

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Bambang Ismanto*

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Email : bambang.ismanto@staff.uksw.edu

Abstrak

Artikel ini mengkaji hasil pemetaan mutu pendidikan dan kebijakan peningkatan mutu SD, SMP, SMA dan SMK di Jawa Tengah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja mutu dan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dalam peningkatan mutu pendidikan. Metode kajian dengan pendekatan campuran (mixed method) berdasarkan data kuantitatif dokumen pemetaan mutu dan analisis konten kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Pemetaan mutu pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian dan standar pengelolaan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kinerja mutu pendidikan belum memenuhi standar nasional pendidikan dengan skor < 6,66 dari skor yang ditetapkan. Pada jenjang SD skor rata-rata 4,80 dengan skor terendah standar penilaian (4,00) dan tertinggi standar isi (5,39). Sedangkan pada jenjang SMP skor rata-rata 4,92 dengan skor terendah standar penilaian (4,06) dan tertinggi standar kompetensi lulusan (5,35). Pada jenjang SMA skor rata-rata 5,01 dengan skor terendah standar penilaian (4,24) dan tertinggi standar kompetensi lulusan (5,61). Sementara itu pada jenjang SMK skor rata-rata 4,99 dengan skor terendah standar penilaian (4,06) dan tertinggi standar kompetensi lulusan (5,51). Pendidikan menjadi salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota. Sesuai UU 23 Tahun 2014, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah difokuskan untuk meningkatkan mutu SMA dan SMK pada standar proses. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kota, pada jenjang SD dan SMP difokuskan pada standar penilaian.

Kata Kunci : Kinerja, Mutu, Standar Nasional Pendidikan, SD, SMP, SMA, SMK

Pendahuluan

Pendidikan bermutu menjadi harapan masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan kesempatan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dalam mengelola sumber daya untuk peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Dinamika kehidupan masyarakat perlu direspon dengan pengelolaan pendidikan yang bermutu.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional yang dimaksudkan meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan

tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih profesional, dan 4) meningkatkan persaingan yang sehat (Usman, 2009:513-514). Ini berarti bahwa lingkungan pendidikan menjadi inspirasi, dan proses kehidupan bermutu. Namun dalam kenyataannya, mutu pendidikan masih jauh ketinggalan dibandingkan dunia bisnis. Oleh karena itu, pengukuran mutu dan penjaminannya menjadi kebutuhan dalam mempertanggungjawabkan fungsi dan proses proses pencapaian pendidikan bermutu.

Hasil pemetaan mutu pendidikan dianalisis menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan menjadi pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah). Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis

ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kota/kabupaten untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan (Ditjendikdasmen : 2016:9). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemetaan standar nasional pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Peta capaian mutu SNP menjadi *baseline* pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Analisis pemetaan mutu dan rekomendasinya menjadi pertimbangan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten perencanaan program peningkatan mutu. .

Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di atas SNP sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu

pendidikan. Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan harus lebih tinggi dari SNP (Ditjendikdasmen:2016:10). Penetapan standar dan indikatornya harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pemetaan SNP menjadi dasar dalam menetapkan program dan kebijakan pengelolaan sumber daya pendidikan.

Implementasi Desentralisasi dalam makna pencapaian tujuan politik adalah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan prinsip demokratisasi, sedang tujuan desentralisasi dalam pengertian *administrative* adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan (Muchlis DP, 2011:54). Berdasarkan UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Tahun 2016 manajemen pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menjadi tanggung jawab Kabupaten / Kota. Sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Pemetaan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Pemetaan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dilakukan oleh LPMP meliputi 5 standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi; Standar Proses; Standar Penilaian; dan Standar Pengelolaan. Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7, dengan skala capai Menuju SNP level 1 : skor < 2,04, level 2 : 2,04< skor < 3,70; level 3 : 3,70 < skor < 5,06; SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66; dan mencapai SNP : 6,66< skor < 7,00.

Pemetaan capaian mutu SNP baik jenjang pendidikan SD, SMP, SMA maupun SMK Provinsi Jawa Tengah dikategorikan menuju SNP 3. Ini berarti bahwa pendidikan dasar dan menengah di Jawa Tengah belum dapat mencapai SNP. Skor mutu yang paling tinggi dimiliki oleh jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar 5,01, sementara skor mutu yang paling rendah dimiliki oleh jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 4,800. Lebih lanjut hasil pemetaan capaian standar nasional pendidikan masing-masing jenjang pendidikan disajikan dan dijelaskan dalam Tabel 1

Tabel 1. Skor Peta Capaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	5,250	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,390	Menuju SNP 4
Standar Proses	4,188	Menuju SNP 3
Standar Penilaian	4,004	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan	5,169	Menuju SNP 4
SNP	4,800	Menuju SNP 3

Sumber : LPMP Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 capaian mutu jenjang SD di Provinsi Jawa Tengah secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar isi dengan skor mutu 5,390 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar

penilaian dengan skor mutu 4,004. Berdasarkan analisis indikator dari pemetaan standar nasional pendidikan jenjang SD terdapat kekuatan dan kelemahan sebagai berikut

Tabel 2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pemetaan Mutu Jenjang Sekolah Dasar Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2016

Standar	Indikator	Kekuatan	Kelemahan
Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	-	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
Standar Isi	KTSP sesuai dengan Kurnas	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki perangkat pengembangan KTSP Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP 	Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	Perencanaan proses pembelajaran sesuai SNP	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas dokumen RPP sesuai Kurnas Isi RPP sesuai dengan Kurnas 	<ol style="list-style-type: none"> Guru belum membuat RPP secara mandiri RPP tidak dievaluasi oleh Kepala sekolah Penyusunan RPP tidak melibatkan pemangku kepentingan
Standar Penilaian Pendidikan	Penilaian dilakukan dengan transparan	-	Dokumen belum bisa diakses oleh pihak terkait
Standar Pengelolaan Pendidikan	Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah 	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Tabel 3. Skor Peta Capaian SNP Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	5,355	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,350	Menuju SNP 4
Standar Proses	4,622	Menuju SNP 3
Standar Penilaian	4,065	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan	5,211	Menuju SNP 4
SNP	4,921	Menuju SNP 3

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMP di Provinsi Jawa Tengah secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor mutu 5,355 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar penilaian dengan skor mutu 4,065. Sedangkan kelemahan dan kekuatan masing-masing indikator pada jenjang SMP seperti disajikan tabel berikut.

Tabel 4. Analisis Kekuatan dan Kelemahan SNP Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Indikator	Kekuatan	Kelemahan
Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	-	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
Standar Isi	KTSP sesuai dengan Kurnas	Memiliki perangkat pengembangan KTSP	1. Kurang melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP 2. Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	Perencanaan proses pembelajaran sesuai SNP	1. RPP tidak dievaluasi oleh Kepala sekolah 2. Kualitas dokumen RPP sesuai Kurnas 3. Isi RPP sesuai dengan Kurnas	1. Guru belum membuat RPP secara mandiri 2. Penyusunan RPP tidak melibatkan pemangku kepentingan
Standar Penilaian Pendidikan	Penilaian dilakukan dengan transparan	-	Dokumen belum bisa diakses oleh pihak terkait

Standar Pengelolaan Pendidikan	Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pamangku kepingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah 2. Perencanaan dilakukan bersama oleh Pamangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pamangku kepentingan sekolah 	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar
--------------------------------	---	---	--

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Capaian mutu pendidikan pada pendidikan menengah jenjang SMA dan SMK menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pada jenjang SD dan SMP. Berikut disajikan

tabel skor capaian mutu dan deskripsi kekuatan dan kelemahan setiap standar nasional pendidikan

Tabel 5. Skor Peta Capaian SNP Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	5,607	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,141	Menuju SNP 4
Standar Proses	4,758	Menuju SNP 3
Standar Penilaian	4,224	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan	5,315	Menuju SNP 4
SNP	5,009	Menuju SNP 3

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMA di Provinsi Jawa Tengah secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor mutu 5,607 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar penilaian dengan skor mutu 4,224. Berikut gambaran kekuatan dan kelemahan pendidikan Sekolah

Menengah Atas yang ada di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada indikator yang paling lemah. Kondisi ini akan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan peningkatan mutu pendidikan SMA. Kebijakan disusun dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan capaian mutu untuk setiap sub indikator pada masing-masing indikator untuk setiap standar.

Tabel 6. Analisis Kekuatan dan Kelemahan SNP Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Indikator	Kekuatan	Kelemahan
Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	-	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
Standar Isi	KTSP sesuai dengan Kurnas	1. Memiliki perangkat pengembangan KTSP	1. Kurang melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP 2. Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	Perencanaan proses pembelajaran sesuai SNP	1. RPP dievaluasi oleh Kepala sekolah 2. Kualitas dokumen RPP sesuai Kurnas 3. Isi RPP sesuai dengan Kurnas	1. Guru belum membuat RPP secara mandiri 2. Penyusunan RPP tidak melibatkan pemangku kepentingan
Standar Penilaian Pendidikan	Penilaian dilakukan dengan transparan	-	Dokumen belum bisa diakses oleh pihak terkait
Standar Pengelolaan Pendidikan	Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan	1. Dokumen pengelolaan berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah 2. Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMK di Provinsi Jawa Tengah secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor

mutu 5,511 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar penilaian dengan skor mutu 4,061. Pada tabel berikut diajikan kekuatan dan kelemahan setiap standar nasional pendidikan.

Tabel 7. Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	5,511	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,496	Menuju SNP 4
Standar Proses	4,754	Menuju SNP 3
Standar Penilaian	4,061	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan	5,147	Menuju SNP 4
SNP	4,994	Menuju SNP 3

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Tabel 8. Analisis Kekuatan dan Kelemahan SNP Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Indikator	Kekuatan	Kelemahan
Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	-	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
Standar Isi	KTSP sesuai dengan Kurnas	1. Memiliki perangkat pengembangan KTSP	1. Kurang Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP 2. Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	Perencanaan proses pembelajaran sesuai SNP	1. RPP tidak dievaluasi oleh Kepala sekolah 2. Kualitas dokumen RPP sesuai Kurnas 3. Isi RPP sesuai dengan Kurnas	1. Guru belum membuat RPP secara mandiri 2. Penyusunan RPP tidak melibatkan pemangku kepentingan
Standar Penilaian Pendidikan	Penilaian dilakukan dengan transparan	-	Dokumen belum bisa diakses oleh pihak terkait

Standar Pengelolaan Pendidikan	Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan	1. Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah 2. Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar
--------------------------------	--	---	--

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan (Ditjendikdasmen : 2016:5). Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh: (1) Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan nasional yang mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan secara nasional; (2) Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan

yang mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya; (3) Kebijakan satuan pendidikan yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan program dalam menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai acuan mutu pendidikan: (4) Kepemimpinan kepala satuan pendidikan yang efektif; (5) Partisipasi, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penjaminan maupun peningkatan mutu satuan pendidikan; (6) Akuntabilitas, transparansi dan integritas yang menjadi budaya organisasi satuan pendidikan, pemerintah maupun pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan (Ditjendikdasmen : 2016:20)

Menurut Edward III, dalam Muchlis DP (2011:2), implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Masalah utama dari Administrasi Publik adalah "*lack of attention to implementation. Without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*".

Tabel 9. Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Kelemahan	Rekomendasi Fasilitasi
Standar Kompetensi Lulusan	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Satuan pendidikan perlu memperoleh pelatihan/workshop bedah standar kompetensi lulusan
Standar Isi	Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan	Satuan pendidikan didorong untuk melakukan sosialisasi perangkat KTSP kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum membuat RPP secara mandiri 2. RPP tidak dievaluasi oleh Kepala sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis penyusunan RPP kepada guru 2. Peningkatan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas kepada guru dalam membuat RPP

Tabel 10. Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Kelemahan	Rekomendasi Fasilitasi
Standar Kompetensi Lulusan	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Satuan pendidikan perlu memperoleh pelatihan/workshop bedah standar kompetensi lulusan
Standar Isi	Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan	Satuan pendidikan didorong untuk melakukan sosialisasi perangkat KTSP kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum membuat RPP secara mandiri 2. Penyusunan RPP tidak melibatkan pemangku kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis penyusunan RPP kepada guru 2. Peningkatan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas kepada guru dalam membuat RPP 3. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun RPP (masyarakat, DUDI)
Standar Penilaian	Dokumen belum bisa diakses oleh pihak terkait	Bimbingan teknis penyusunan perangkat instrumen penilaian
Standar Pengelolaan Pendidikan	Ruang lingkup dokumen pengelolaan belum sesuai Standar	Pelatihan penyusunan RKS berdasarkan hasil EDS

Tabel 11. Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Kelemahan	Rekomendasi Fasilitasi
Standar Kompetensi Lulusan	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Satuan pendidikan perlu memperoleh pelatihan/workshop bedah standar kompetensi lulusan
Standar Isi	Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan	Satuan pendidikan didorong untuk melakukan sosialisasi perangkat KTSP kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum membuat RPP secara mandiri 2. Penyusunan RPP tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis penyusunan RPP kepada guru 2. Peningkatan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas kepada guru dalam membuat RPP 3. Meningkatkan

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Tabel 12. Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Standar	Kelemahan	Rekomendasi Fasilitasi
Standar Kompetensi Lulusan	Kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Satuan pendidikan perlu memperoleh pelatihan/workshop bedah standar kompetensi lulusan
Standar Isi	Kurang melakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan	Satuan pendidikan didorong untuk melakukan sosialisasi perangkat KTSP kepada pemangku kepentingan
Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum membuat RPP secara mandiri 2. Penyusunan RPP tidak melibatkan pemangku kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis penyusunan RPP kepada guru 2. Peningkatan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas kepada guru dalam membuat RPP 3. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun RPP (masyarakat, DUDI)
Standar Penilaian Pendidikan	Dokumen belum bisa diakses oleh pihak terkait	Bimbingan teknis penyusunan perangkat/instrument penilaian
Standar Pengelolaan Pendidikan	Ruang lingkup dokumen pengelolaan belum sesuai standar	Pelatihan penyusunan RKS berdasarkan hasil EDS

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Lambelanova 2017:193 menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yang berkaitan dengan resources committed yaitu faktor ke-2 yaitu sumber-sumber (resources) sebagai berikut: (a) Sumber-sumber (resources): sumber daya yang ada, diantaranya adalah: sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (masyarakat) yang berada di daerah tersebut, (b) Aparat yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, (c) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi; (d) dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, (e) wewenang yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan kebijakan

Untuk melakukan standar yang telah ditentukan tersebut dilakukan melalui pembuatan standar operasional prosedur (SOP), sehingga ada kepastian cara yang ditempuh dan dalam penelitian ini nantinya dilakukan melalui uji coba, sampai pada satu siklus, sehingga dapat terukur pada bagian mana/bidang apa yang tidak dapat dilakukan atau standar yang ditetapkan tidak dapat memenuhi prosedur, dengan demikian Jaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah dapat terealisasi, dan tidak hanya menjadi simbol, tetapi dapat merupakan suatu pengembangan mutu berkelanjutan 'kaizen' (Uchtiawati :2014:5)

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan perlu didukung

oleh sebuah *Political will, political commitment* dan *political action* yang kuat dari pemerintah agar kebijakan yang selama ini yang dirasakan belum menunjukkan komitmen yang tinggi serta usaha yang gigih (*strive for excellence*) dapat dihilangkan dari penilaian masyarakat (Muchlis DP :2011:54). Munandar dalam Lambelanova (2017:189) menyatakan bahwa dalam konteks governance, masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan sebagai warga (citizen). Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah melainkan sebagai mitra pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.

Rekomendasi peningkatan mutu pendidikan perlu partisipasi pemangku kepentingan. Menurut Lambelanova (2017:188), dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*) masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana".

Berdasarkan pemetaan dan rekomendasi mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota diperlukan kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :
 - 1.1. Memberdayakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai pusat pengembangan pendidikan di Jawa Tengah
 - 1.2. Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas, Guru dan Komite

- dalam penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SMA dan SMK melalui workshop, penetapan benchmarking sekolah rujukan dan penulisan buku profil sekolah
- 1.3. Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Guru dalam penjabaran Standar isi dalam pencapaian standar kompetensi lulusan SMA dan SMK melalui workshop dan insentif penulisan buku
 - 1.4. Meningkatkan kemampuan guru SMA dan SMK dalam mengelola proses pembelajaran melalui workshop penyusunan RPP dan pembelajaran berbasis teknologi informasi
 - 1.5. Meningkatkan kemampuan guru SMA dan SMK dalam melaksanakan penilaian pembelajaran melalui workshop penulisan penilaian pembelajaran.
 - 1.6. Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Komite SMA dan SMK dalam pengelolaan sumber daya yang relevan dengan pencapaian visi, misi dan program sekolah
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota :
- 2.1. Membentuk sistem penjaminan mutu SD, dan SMP dengan program yang obyektif, transparan dan akuntabel
 - 2.2. Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas, Guru dan Komite dalam penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SD dan SMP melalui workshop, penetapan benchmarking sekolah rujukan dan penulisan buku profil sekolah
 - 2.3. Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Guru dalam

penjabaran Standar isi dalam pencapaian standar kompetensi lulusan SD dan SMP melalui workshop dan insentif penulisan buku

- 2.4. Meningkatkan kemampuan guru SD dan SMP dalam mengelola proses pembelajaran melalui workshop penyusunan RPP dan pembelajaran berbasis teknologi informasi
- 2.5. Meningkatkan kemampuan guru SD dan SMP dalam melaksanakan penilaian pembelajaran melalui workshop penulisan penilaian pembelajaran.
- 2.6. Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Komite SD dan SMP dalam pengelolaan sumber daya yang relevan dengan pencapaian visi, misi dan program sekolah

Penutup

Berdasarkan deskripsi pemetaan dan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah disimpulkan sebagai berikut . Pertama , capaian standar nasional Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK belum memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, standar kompetensi lulusan menjadi acuan dalam pengelolaan standar isi, proses, penilain dan pengelolaan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Memperhatikan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk :1) Memberdayakan LPMP Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat dan rujukan peningkatan mutu pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK, 2) Hasil pemetaan mutu pendidikan menjadi input dalam perencanaan program peningkatan mutu pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK, 3)

Meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas, Guru bersama Komite Sekolah dalam mengelola sistem penjaminan mutu secara obyektif, transparan dan akuntabel, 4) Secara lebih khusus Pemerintah Kabupaten / Kota untuk membentuk lembaga penjaminan mutu baik di lingkungan Dinas Pendidikan ataupun di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Sudarsono, 2015, Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2015; 111-116 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615

Referensi

Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, (Ditjendikdasmenmen), 2016, Modul 3 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lambelanova Rossy, 2017, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017 : 185 – 198

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), 2017, Pemetaan Mutu Pendidikan, LPMP, Jawa Tengah

Muchlis DP , 2011, Kebijakan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 No. 1 Thn. 2011, DIUNDUH dari <http://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/874/192>, Jumat, 11 Mei 2018

Sekolah Menengah Atas berstandar Internasional, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 1, Januari 2014; 52-56 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615

Sudarsono, 2015, Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2015; 111-116 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615